

ABSTRAK

MUHAMMAD ICHLAS THAMSI. NIM : 0057.02.56.2022. Peran TNI Angkatan Laut dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perikanan Penggunaan Bom Ikan dan Bahan Kimia di Perairan Makassar. Dibimbing oleh Hambali Thalib dan Anggreany Arief.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: (1) Untuk memahami dan menganalisis peran yang dimiliki oleh penyidik Pangkalan Utama TNI AL VI (Lantamal VI) dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan perikanan penggunaan bom ikan dan bahan kimia, di perairan Makassar; (2) Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi Lantamal VI dalam melaksanakan tugas penegakan hukum pidana kejahatan perikanan penggunaan bahan peledak dan bahan kimia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara dan dokumentasi.

Sampel dalam penelitian: 14 penyidik Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VI, 10 nelayan dan sampel penelitian pembanding 4 orang Penyidik Pangkalan PSDKP Makassar serta 2 orang Penyidik dari Polairud Polda Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Peran TNI AL dalam penegakan hukum terkait kejahatan perikanan adalah kewenangan Atribusi berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2024 tentang TNI dan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, namun dalam pelaksanaan penegakan hukum pengguna bom ikan dan bahan kimia masih kurang efektif. (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terkait kejahatan perikanan penggunaan bom ikan dan bahan kimia yakni masih kurangnya anggaran operasional, kurangnya sarana dan prasarana dihadapkan luasnya wilayah laut tanggung jawab Lantamal VI, koordinasi instansi terkait kurang efektif, perubahan aturan hukum yang lebih ringan dan budaya nelayan melanggar hukum.

Rekomendasi Penelitian : (1) Lantamal VI melaksanakan peran dari kewenangan atribusi sebagai salah satu tugas negara untuk mengevaluasi pelaksanaan yang kurang efektif dengan merumuskan kebijakan strategis guna meningkatkan efektifitas penegakan hukum. (2) Langkah strategis mengatasi faktor penghambat yakni : peningkatan anggaran, kelengkapan sarana dan prasarana, membangun sistem koordinasi efektif, edukasi dan kesadaran hukum dan peningkatan sumber daya manusia penyidik.

Kata kunci: TNI Angkatan Laut, penegakan hukum, Kejahatan Perikanan.

ABSTRACT

MUHAMMAD ICHLAS THAMSI. NIM : 0057.02.56.2022. *The Indonesian Navy's Role in Law Enforcement Against Fishing Crimes Using Fish Bombs and Chemical Substances in Makassar Waters. Suvervised by Hambali Thalib and Anggreany Arief.*

This research was conducted with the aim to: (1) To understand and analyze the role possessed by investigators of the 6TH Base of Indonesian Navy in the context of law enforcement against fisheries crimes using fish bombs and chemicals, in Makassar waters; (2) To identify and analyze factors that become obstacles for 6THBase of Indonesian Navy in carrying out criminal law enforcement duties for fisheries crimes using explosives and chemicals.

This research uses empirical legal research methods, data collection carried out with interviews and documentation. The sample in the study consisted of 7 investigators from 6TH Base of Indonesian Navy 4 fishing offenders using fish bombs and 3 chemicals, 3 regular fishermen and a comparative research sample of 4 PSDKP Investigator Makassar and 2 Investigators from Polairud Polda Sulawesi South

The results showed that: (1) The role of the Navy in law enforcement related to fisheries crimes is the authority of attribution from the state based on Law No. 34 of 2024 concerning the TNI and Law No. 45 of 2009 concerning Amendments to Law No. 31 of 2004 concerning Fisheries, but in the implementation of law enforcement the use of fish bombs and chemicals is still ineffective. (2) Factors that become obstacles in law enforcement related to fisheries crimes, the use of fish bombs and chemicals, namely the lack of operational budget, lack of facilities and infrastructure faced with the vast sea area of responsibility of the 6TH Base of Indonesian Navy, fishermen's culture and behavior, changes in lighter legal rules, limited human resources for investigators and ineffective coordination of related agencies.

Research Recommendations: (1) 6TH Base of Indonesian Navy carries out the role of the authority given by the state as one of the state's duties to evaluate ineffective implementation by formulating strategic policies to improve the effectiveness of law enforcement. (2) Strategic steps to overcome obstacles to increase the special budget in the field of fisheries, completeness of facilities and infrastructure, build a more effective coordination system, education and legal awareness and increase of human resources.

Keywords: Indonesian Navy, law enforcement, Fisheries Crime.